

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Norma lingkungan hidup mencakup prinsip-prinsip atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan, baik yang tertulis dalam hukum maupun tidak tertulis dalam bentuk adat, tradisi, atau nilai sosial. Norma ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup manusia. Tanpa penerapan norma lingkungan hidup, kerusakan alam akan semakin parah, dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Penerapan norma lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ada beberapa jenis dari norma lingkungan hidup antara lain norma hukum, norma sosial, norma agama, norma adat. Jenis jenis norma diatas memiliki keterkaitan dalam penerapan norma lingkungan hidup yang bertujuan membangun suatu ekosistem berkelanjutan terkait lingkungan.

Dalam mencapai pembangunan *Green City* di DKI Jakarta *Green Politic* memegang peranan penting dalam melihat keseriusan serta cara yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta *Green Politic* (politik hijau) merupakan ideologi politik yang berfokus pada isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Green

politik bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan manusia dan pelestarian ekosistem. Ideologi ini mendorong pendekatan yang ramah

Lingkungan dalam kebijakan pemerintah, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat. *Green Politic* itu sendiri merupakan gerakan pendekatan yang ditujukan untuk suatu Negara atau daerah menggunakan asa pembangunan berkelanjutan dan memikirkan lingkungan dalam melakukan pengembangan atau pembangunan. Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan, pengurangan perubahan iklim, dan keberlanjutan sebagai prioritas utama. Ada beberapa prinsip utama dari Green Politic yaitu keberlanjutan ekologis, keadilan social, demokrasi partisipatif, non-kekerasan, penghormatan terhadap keanekaragaman. Dengan ini pemerintah DKI Jakarta akan melakukan internalisasi norma lingkungan yang bertujuan untuk memasukan dan memberikan kebijakan baru terkait pembenahan lingkungan yang terjadi di DKI Jakarta. Internalisasi norma itu sendiri . Internalisasi norma merupakan bagian dari proses sosialisasi, di mana individu belajar memahami, menerima, dan mengintegrasikan nilai-nilai atau aturan sosial ke dalam pola pikir dan perilaku. Norma yang telah terinternalisasi akan memengaruhi tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi (Firnemoore dan Sikkink, 1998).

Dalam beberapa tahun belakangan isu lingkungan di daerah Ibu kota Jakarta mulai menjadi isu yang sangat di perhatikan, hal ini terjadi karena pencemaran lingkungan yang erjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta semakin mengkhawatirkan. Ada

beberapa isu lingkungan yang menjadi perhatian di kawasan Ibu Kota Jakarta, yaitu polusi udara, banjir, pengelolaan limbah sampah yang berupa sampah rumah tangga dan sampah di tempat umum. Masyarakat DKI Jakarta memang sudah mulai sadar akan permasalahan tersebut, hal ini timbul karena mulai meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Salah satu firma pengumpul indeks kualitas udara asal Swiss, *IQAIR* mendedikasikan DKI Jakarta sebagai salah satu kota paling berpolusi di dunia, hal ini didukung dengan data yang dikumpulkan oleh pihak *IQAIR* selama di Jakarta dengan indeks kualitas udara mencapai 154 *AQI US (Air Quality Index United States)*. Istilah ini adalah indeks kualitas udara yang dikembangkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat EPA (*Environmental Protection Agency*) untuk mengukur tingkat polusi udara di suatu area dan kandungan polutan utama senilai PM 2.5, dengan angka ini, DKI Jakarta berada di peringkat teratas sebagai salah satu kota dengan polusi tertinggi di dunia

Namun permasalahan Di Ibu Kota sendiri tidak hanya tentang polusi udara namun pencemaran lingkungan berupa pencemaran air dan krisis air juga akan dihadapi oleh DKI Jakarta, Terdapat 13 sungai yang mengalir di Jakarta. Dari semua itu, tidak ada satu pun yang bersih dari pencemaran. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pencemaran di 13 sungai DKI Jakarta berada pada kategori tercemar sedang hingga berat. Pencemaran tersebut turut mempengaruhi kualitas lingkungan di Teluk Jakarta Sangat wajar jika air di Muara Angke, salah satu muara di Jakarta, menjadi hitam akibat penumpukan polusi dari sungai. Pencemaran

terhadap sungai juga menjadi salah satu akibat dari penumpukan sampah yang ada di DKI Jakarta, di mana masalah sampah telah mencapai fase krisis. Menurut data dari Walhi Jakarta, hingga tahun 2020, baik volume timbunan maupun sampah yang diterima di Bantargebang keduanya menunjukkan kecenderungan meningkat. Sampah yang dihasilkan sendiri adalah sampah yang muncul dari Jakarta, dengan jumlah yang pada tahun 2015 mencapai 7.506 ton per hari, meningkat menjadi 8.369 ton per hari pada tahun 2020.

Peningkatan jumlah tersebut diperburuk oleh pengelolaan sampah yang masih menerapkan sistem kumpul-angkut-buang tanpa pemisahan yang ketat. Pada tahun 2020, dari total 8.369 ton limbah harian Jakarta, hanya 945 ton yang berkurang sebelum masuk ke Bantargebang, sementara 7.000 ton sisanya dibuang ke Bantargebang. Bantargebang yang seharusnya hanya menangani sampah residu terpaksa menerima berbagai jenis sampah. Akibatnya, Bantargebang juga runtuh. Pada 2021, kapasitas Bantargebang telah melampaui batas penyimpanan. TPST yang hanya dapat menampung 21.879.000 m³ sampah ini terpaksa menampung sampai 22.387.370 m³. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menangani permasalahan lingkungan bukan tidak ada, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi kedua masalah di atas dengan menerapkan ganjil – genap dikawasan DKI Jakarta untuk mengurangi tingkat polusi udara dan juga pemerintah telah mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta serta menghimbau masyarakat dalam menggunakan angkutan umum,

selain itu pemerintah DKI Jakarta juga berkomitmen untuk menggunakan bis Listrik untuk transportasi umum di Jakarta guna mendukung pengurangan polusi udara. Selain itu pemerintah DKI Jakarta juga melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan berupa pencemaran yang diakibatkan oleh sampah, pemerintah DKI Jakarta juga berkerjasama dengan beberapa organisasi Internasional yang berorientasi pada pengelolaan sampah dan penanggulangan masalah limbah rumah tangga dan limbah umum yang menumpuk di DKI Jakarta hal ini bertujuan agar tercapainya pembangunan *Green City* Di DKI Jakarta.

1.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas , penulis menarik sebuah rumusan masalah yang akan di teliti:

Bagaimana internalisasi norma *Green Politics* sebagai upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mencapai tujuan yaitu pembangunan *Green City*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 tujuan diantaranya tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, dengan penjabaran sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Bagaimana Hubungan Internasional dari aspek kerjasama dan kebijakan yang dilakukan oleh aktor pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dengan organisasi Internasional untuk menuju DKI Jakarta menjadi *Green City*.

1.3.2. Tujuan Khusus

Menjelaskan secara ilmiah bahwa permasalahan lingkungan yang ada di kawasan DKI Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, serta menjelaskan bagaimana upaya – upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam mencapai tujuannya yaitu pembangunan *Green City*.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun uraian manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan kita sebagai mahasiswa Hubungan Internasional terhadap bagaimana bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang akan di ambil oleh Pemda DKI Jakarta untuk pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai kota *Green City*.

1.4.2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi berbagai pihak mengenai internalisasi Norma yang merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kebijakan dapat dirumuskan dan dapat diterima oleh masyarakat serta memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dengan beberapa tahapan yaitu (*Norm Emergence, Norm Cascade, Internalization.*) Penelitian ini juga dapat di jadikan rujukan terkait bagaimana pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan kebijakan tersebut dapat di terima oleh masyarakat

1.5.Kerangka Pemikiran Konseptual

Studi mengenai internalisasi norma global telah mengalami perkembangan signifikan sejak diperkenalkannya teori siklus norma oleh Finnemore dan Sikkink (1998). Teori ini menyajikan tiga tahapan utama: norm emergence, norm cascade, dan norm internalization. Dalam konteks norma lingkungan, kerangka ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip lingkungan internasional—seperti keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim—bertransformasi menjadi kebijakan dan praktik lokal di tingkat kota seperti Jakarta. Sebagaimana dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink, proses norm emergence dimulai ketika aktor normatif (norm entrepreneurs) mempromosikan nilai tertentu dalam arena internasional. Ketika norma ini mendapatkan penerimaan luas, ia masuk ke tahap cascade, yakni adopsi oleh negara dan institusi melalui tekanan internasional dan dinamika imitasi. Akhirnya, dalam

tahap internalization, norma menjadi bagian dari struktur regulatif dan identitas aktor, serta dianggap sebagai praktik standar dalam pemerintahan atau masyarakat (Finnemore & Sikkink, 1998).

Transisi dari norma global ke penerimaan lokal tidak selalu linier dan seringkali dipengaruhi oleh kompromi institusional. Bernstein (2001) menyoroti bagaimana norma lingkungan internasional, seperti pembangunan berkelanjutan, diinternalisasi melalui liberal environmentalism yakni kompromi antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan. Dalam kerangka ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia menerima norma global bukan karena konversi ideologis semata, melainkan untuk menjaga legitimasi politik dan akses terhadap bantuan internasional. Kontekstualisasi norma lingkungan di tingkat kota memerlukan analisis terhadap tata kelola multilevel. Bulkeley dan Betsill (2005) menegaskan bahwa kota bukan hanya objek pasif kebijakan nasional, melainkan ruang strategis dalam pelaksanaan kebijakan iklim global. Dalam kasus Jakarta, peran pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta membentuk konfigurasi lokal yang mempengaruhi cara norma global diterjemahkan dalam kebijakan konkret, seperti Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan bagaimana narasi global tentang *Eco City* atau *Green City* diadopsi secara selektif di kota-kota Global South. Joss, Cowley, dan Tomozeiu (2013) menunjukkan bahwa adopsi model *Eco City* tidak selalu mencerminkan internalisasi penuh norma lingkungan, tetapi lebih pada proses

adaptasi simbolik yang disesuaikan dengan kebutuhan domestik dan politik lokal. Di Jakarta, hal ini tampak dalam proyek seperti revitalisasi Kali Ciliwung dan pembangunan ruang terbuka hijau yang menggunakan narasi keberlanjutan, tetapi kerap menghadapi tantangan dalam implementasi sosial. Dengan demikian, studi literatur ini memperlihatkan bagaimana internalisasi norma lingkungan global di Jakarta bukan sekedar proses dari aktor internasional ke lokal, melainkan hasil dari interaksi dinamis antar level pemerintahan, aktor transnasional, dan konteks lokal yang unik.

1.5.1. Internalisasi Norma Internasional

Internalisasi norma internasional merupakan konsep teoritis yang menjelaskan bagaimana norma-norma internasional diadopsi, diserap, dan menjadi bagian dari perilaku serta kebijakan negara atau aktor internasional lainnya (Finnemore & Sikkink, 1998). Tahap internalisasi norma menggambarkan bagaimana norma diinternalisasi oleh aktor sebagai hasil dari penyebarannya di seluruh komunitas atau sistem aktor. Ketika norma telah terinternalisasi, perilaku yang dihasilkan dari norma tersebut tidak lagi dipertanyakan. Konsep ini menjadi sangat penting dalam memahami dinamika hubungan internasional kontemporer, karena memberikan penjelasan tentang bagaimana ide-ide dan nilai-nilai dapat mempengaruhi perilaku negara di luar pertimbangan material semata (Wendt, 1992). Teori internalisasi norma internasional sangat erat kaitannya dengan paradigma konstruktivisme dalam Hubungan Internasional (Checkel, 1998). Konstruktivisme menunjukkan bahwa bukan hanya

distribusi kekuatan material, kekayaan, dan kondisi geografis yang dapat menjelaskan perilaku negara, tetapi juga ide, identitas, dan norma. Dalam perspektif ini, norma sosial dikonseptualisasikan sebagai aspek struktur sosial yang muncul dari tindakan dan kepercayaan aktor dalam komunitas tertentu; norma membentuk tindakan dan kepercayaan tersebut dengan membentuk identitas dan kepentingan aktor (March & Olsen, 1998). Lebih lanjut, negara memperoleh identitas mereka dari individu, budaya, dan norma, sehingga memandang anarki internasional diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap negara (Katzenstein, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa struktur internasional tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial dan dapat berubah melalui interaksi antar aktor.

Salah satu kerangka teoritis paling berpengaruh dalam memahami internalisasi norma adalah model yang dikembangkan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, yang menggambarkan tiga tahap evolusi norma internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Tahap pertama adalah kemunculan norma (*norm emergence*), yang melibatkan "norm entrepreneurs" atau pengusaha norma yang mempromosikan ide-ide baru tentang perilaku yang tepat dan berusaha meyakinkan sejumlah kritis negara untuk mengadopsi norma baru tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998). Tahap kedua adalah kaskade norma (*norm cascade*), di mana setelah mencapai "tipping point" atau titik kritis, norma mulai menyebar dengan cepat ke seluruh sistem internasional, dengan negara-negara mengadopsi norma tidak hanya karena manfaat intrinsiknya, tetapi juga karena tekanan untuk menyesuaikan diri dengan praktik internasional yang diterima

(Finnemore & Sikkink, 1998). Tahap ketiga adalah internalisasi norma (norm internalization), pada tahap ini norma menjadi begitu diterima secara luas sehingga tidak lagi diperdebatkan atau dipertanyakan, dan telah menjadi bagian integral dari identitas dan perilaku aktor internasional (Finnemore & Sikkink, 1998).

Proses internalisasi norma terjadi melalui beberapa mekanisme penting yang saling berinteraksi. Studi tentang norma menyoroti "logika kelayakan" yang bekerja dalam politik internasional, dengan aktor internasional bertindak sesuai dengan cara yang mereka yakini baik, daripada sekadar memaksimalkan utilitas (March & Olsen, 1989). Mekanisme ini menunjukkan adanya perbedaan antara *Logic Of Appropriateness* dan *Logic Of Consequences* dalam pengambilan keputusan (Checkel, 2001). Selain itu, konstruktivis meyakini bahwa norma sosial, bukan kekuatan material, membentuk perilaku negara, di mana identitas nasional dan budaya memainkan peran penting dalam menentukan norma mana yang akan diadopsi dan bagaimana mereka diinterpretasikan (Finnemore & Sikkink, 1998). Proses sosialisasi dan pembelajaran juga menjadi kunci, karena negara-negara belajar norma-norma baru melalui interaksi dengan organisasi internasional, NGO, dan negara lain, baik melalui mekanisme formal seperti perjanjian internasional maupun informal seperti diplomasi dan pertukaran budaya (Checkel, 1997).

Keberhasilan internalisasi norma dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks. Faktor internal meliputi struktur politik domestik, budaya dan nilai-nilai nasional, kepentingan ekonomi dan keamanan, serta peran aktor

domestik seperti LSM dan kelompok kepentingan. Sementara faktor eksternal mencakup tekanan internasional, insentif dan sanksi, peran organisasi internasional, dan pengaruh negara-negara kuat atau hegemon (Keck & Sikkink, 1998). Interaksi antara faktor-faktor ini menentukan sejauh mana dan seberapa cepat suatu norma dapat terinternalisasi dalam sistem politik suatu negara (Koh, 1997). Meskipun teori internalisasi norma internasional memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hubungan internasional, teori ini juga menghadapi beberapa kritik dan keterbatasan. Kritik utama meliputi ambiguitas konseptual dalam mengukur kapan sebuah norma benar-benar "terinternalisasi", kecenderungan determinisme normatif yang mengabaikan peran kepentingan material dan kekuasaan, bias budaya Barat karena sebagian besar norma yang dipelajari berasal dari konteks Barat, dan kesulitan empiris dalam membuktikan secara konkret bahwa norma, bukan faktor lain, yang mendorong perubahan perilaku negara (Acharya, 2004).

Terlepas dari kritik-kritik tersebut, teori internalisasi norma internasional tetap relevan dalam memahami berbagai fenomena kontemporer seperti penyebaran norma hak asasi manusia, norma lingkungan dan perubahan iklim, norma keamanan siber, anti-korupsi dan *Good Governance*, serta norma perdagangan internasional (Sandholtz, 2008). Kerangka teori ini memberikan pemahaman penting tentang bagaimana ide-ide dan nilai yang menyebar dalam sistem internasional dan mempengaruhi perilaku negara, melengkapi penjelasan tradisional yang fokus pada kekuasaan dan kepentingan

material, sehingga memberikan gambaran yang lebih akademisii tentang kompleksitas hubungan internasional modern (Adler, 2002).

Table 1.1 : Tahapan internalisasi Norma Lingkungan Internasional

	Stage 1 Norm Emergence	Stage 2 Norm Cascade	Stage 3 Internalization
Actors	1. Masyarakat 2. Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) 3. Tokoh Masyarakat	1. Pemerintah 2. Organisasi internasional	1. PEGUB 2. Perda 3. Undang- Undang
Motive	1. Kepentingan umum 2. Kerusakan lingkungan 3. Penataan Wilayah Ibu Kota	1. Komitmen Ideasional 2. Mencari Legitimasi	Penyesuaian dan pelaksanaan Norma
Dominant Mechanism	Melakukan tindakan persuasif	Sosialisasi Norma Lingkungan	Internalisasi Norma Lingkungan

Sumber : Martha Finnemore,, and Kathryn Sikkink. 1998

Kerangka pemikiran ini akan mendukung penulis dalam menyusun analisis mengenai Internalisasi Norma Internal "*Green Politics*" dalam usaha pemerintah DKI Jakarta menuju *Green City*. Dalam tulisan Finemore dan Sikkink dijelaskan lebih mendalam tentang dimensi-dimensi yang memengaruhi siklus hidup norma dengan mencantumkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Penulis akan menerapkan dua tahap yaitu Norm Emergence untuk menganalisis isu yang ada di DKI Jakarta, yaitu masalah pencemaran lingkungan yang terfokus pada dua aspek, yaitu Polusi udara dan akumulasi sampah di DKI Jakarta. Penulis kemudian akan menerapkan tahapan kedua, yaitu Internalization Norm untuk memfokuskan interpretasi kebijakan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan di DKI Jakarta. Studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif yang fokus untuk menelusuri dan mencari informasi secara mendalam mengenai upaya serta interpretasi yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta terkait masalah lingkungan. Penulis juga akan memanfaatkan media cetak dan artikel yang relevan dengan topik yang akan dibahas untuk menggali informasi lebih lanjut.

1.5.2. *Green Politics*

Teori Politik Hijau adalah sebuah konsep atau ideologi politik yang bertujuan untuk memajukan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan secara ekologis, dengan dasar pada kepedulian terhadap lingkungan, keadilan sosial, dan kehidupan yang demokratis. Yang dihasilkan oleh perilaku seseorang. (Apriwan, 2011: 34-59). Teori Green Politics muncul dari pengintegrasian antara konsep politik dan konsep

lingkungan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Keberadaan gerakan politik hijau ini tidak hanya muncul dan tumbuh di arena politik nasional, tetapi juga telah menyebar dan berkembang secara internasional. Menurut Tim Hayward, teori politik hijau berkembang dari ide bahwa manusia adalah bagian dari alam, sehingga manusia harus berperan dalam melestarikan lingkungan tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, dalam konteks ini manusia tidak hanya dipandang sebagai individu yang rasional tetapi juga sebagai bagian dari alam (Makhluk Alam). Teori politik telah diajukan oleh berbagai tokoh, salah satunya adalah Eckersley. Eckersley, dalam tulisannya Apriwan (2011: 45), menyebutkan bahwa ekosentrisme merupakan salah satu ciri khas dari Politik Hijau karena ekosentrisme menolak perspektif antroposentris yang hanya memberikan nilai moral kepada manusia dan mengedepankan kepentingan individu manusia terhadap lingkungan. Sementara itu, esensi dari Teori Politik Hijau terletak pada nilai kepedulian dan etika lingkungan yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Yang menekankan sumber nilai sebagai realitas dari sesuatu yang dihasilkan oleh proses alami sejarah dan lebih dari sekadar kontribusi manusia. (R.E. Goodin, 1992: 37).

Menurut Andrew Dubson, teori Politik Hijau terfokus pada dua aspek utama. Pertama, menentang pengertian antroposentrisme yang diungkapkan oleh Eckersley. Kedua, diperlukan adanya batasan pertumbuhan yang menjadi salah satu penyebab timbulnya krisis lingkungan hidup. Dua perhatian ini menjadi tanda kerusakan

lingkungan yang semakin cepat di abad ini, disebabkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan kebutuhan manusia terhadap sumber daya yang semakin tidak terkelola (Andrew Dobson, 2007: 43 & 53).

Pada tahun 1960-an, mulai terlihat bahwa terdapat krisis lingkungan hidup yang muncul. Saat ini bisa disebut sebagai "Krisis Ekologis Kontemporer" karena permasalahan lingkungan semakin bertambah dengan efek yang lebih luas dan jangkauan yang lebih besar, serta adanya perhatian global terhadap isu-isu lingkungan.(Eckersley, 2007). Dalam *Green Politics Theory* ekosentrisme merupakan suatu ciri khas dari *Greens Politics* Hal ini disebabkan karena Ekosentrisme menolak perspektif antroposentris yang hanya memberikan nilai moral pada manusia serta mengedepankan kepentingan individu manusia terhadap lingkungan. Teori Hijau muncul sebagai kritik terhadap teori hubungan internasional konvensional yang terlalu berfokus pada manusia dan mengabaikan isu lingkungan dalam analisisnya. Teori hijau berkaitan dengan pandangan anti-antropocentrisme (Dyer, 2020). Pelibatan aktor yang luas merupakan ciri dari masalah lingkungan hidup (Eckersley, 2007). Selain negara, aktor non-negara seperti industri, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal (masyarakat) memainkan peran penting dalam masalah lingkungan hidup ini. Negara melakukan kebijakan ekonomi sewenang-wenang untuk mengejar keuntungan lingkungan hidup jangka pendek.

1.6. Definisi Konseptual

1.6.1. Norma Internasional

Buku yang ditulis oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, *International Norms and Dynamics and Political Change*, memberikan penjelasan tentang konsep norma internasional. Buku tersebut menjelaskan bagaimana norma internasional muncul secara sistematis dan dapat menjadi bagian dari norma internasional yang umumnya diterima. Dalam bukunya, mereka mengaitkan dua elemen, normatif dan idealis, dengan perubahan politik di dunia internasional. Ini menjadi dasar penelitian norma. Terbukti bahwa norma memengaruhi politik internasional dan bagaimana norma memengaruhi politik. sama seperti para pendukung konstruktivisme (Finnemore dan Sikkink , 1998) berusaha untuk membuktikan argumen penelitian mereka karena ilmu hubungan internasional telah berkembang dari sudut pandang materialis ke sudut pandang immaterial, seperti norma dan ide. Bagian-bagian ini dapat mendefinisikan kepentingan suatu negara dalam berperilaku di dunia internasional. Identitas, menurut para konstruktivis, dapat membentuk kepentingan dan mempengaruhi perilaku seseorang. Norma adalah aturan tunggal yang mengatur perilaku. Ada dua jenis norma: norma regulatif yang membatasi perilaku dan norma konstitutif yang memungkinkan aktor baru muncul. Norma nasional dan global berbeda dalam konteks hubungan internasional. Norma internasional berasal dari norma domestik dan mengatur bagaimana suatu negara bertindak. Adanya norma entrepreneur yang mendorong transformasi norma domestik menjadi norma internasional, dan norma internasional

dapat melewati filter negara yang dibuat oleh norma domestik, yang berarti norma internasional dapat mengubah norma domestik (Finnemore & Sikkink, 1998).

1.6.2. *Green politics*

Teori Politik Hijau adalah sebuah konsep atau ideologi politik yang bertujuan untuk mendorong pelestarian lingkungan yang berkelanjutan secara ekologis, yang didasari oleh kepedulian terhadap lingkungan, keadilan sosial, dan kehidupan demokratis. Berdasarkan pada tingkah laku seseorang (Apriwan, 2011: 34-59). Teori Green Politics terbentuk dari penggabungan antara konsep lingkungan hidup dan politik, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup yang mendiami lingkungan tersebut. Keberadaan gerakan politik hijau ini tidak hanya lahir dan tumbuh dalam konteks politik lokal, tetapi juga telah meluas dan berkembang di skala internasional. Teori politik telah diajukan oleh berbagai tokoh, salah satunya adalah Eckersley. Revolusi industri yang dimulai pada tahun 1784 telah memicu perubahan dan kemajuan teknologi di bidang industri, serta memberikan dampak dan transformasi besar terhadap kehidupan sosial ekonomi manusia. Perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, namun saat ini problem lingkungan belum dipandang sebagai masalah penting karena masih dianggap sebagai isu lokal. (Eckersley, 2007).

1.6.3. Kerjasama Dalam Pembangunan *Green City* DKI Jakarta

Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam mencapai tujuannya masing-masing. Kerjasama itu sendiri didasarkan pada kepentingan dari kedua belah pihak dimana para pihak yang ingin berkerjasama memiliki kebutuhan atau kepentingan masing-masing yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Sedangkan menurut Soekanto menyatakan bahwa kerjasama merupakan upaya kolektif antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Max Weber, teori Birokrasi memberikan sumbangan untuk memperkuat kolaborasi dalam organisasi, agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien. Menurut Robbin dalam teori organisasi, organisasi terbentuk karena kebutuhan untuk secara formal mengkoordinasikan pola interaksi anggota-anggota organisasi.

Dalam hal ini pemerintah DKI melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai pembangunan *Green City* salah satu kerjasama yang dilakukan untuk mencapai hal itu adalah pemerintah DKI Jakarta telah melakukan beberapa kerjasama dalam bidang pengelolaan air, pengelolaan polusi udara dan pengelolaan sampah, tiga hal ini merupakan masalah yang paling parah yang terjadi di kawasan DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta banyak melakukan kerjasama dengan pihak asing yang dimana kerjasama tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan terkait air bersih, pembuatan TPS (Tempat pengelolaan sampah), dan kerjasama dalam pengelolaan polusi udara yang ada di DKI Jakarta. Artikel Antara News berjudul "DKI kolaborasi dengan swasta asing sediakan data

kualitas udara" Dalam program Jakarta Clean Air Partnership, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan perusahaan swasta asing Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategies untuk mengatasi polusi udara dengan meningkatkan ketersediaan data kualitas udara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa program kolaborasi ini tidak hanya menyajikan data kualitas udara, tetapi juga menganalisis solusi kebijakan dan efektivitasnya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang efek polusi udara terhadap kesehatan.

Pendiri dari *Bloomberg Philanthropies* dan *Bloomberg LP*, Michael R. Bloomberg juga menyebutkan, kualitas udara yang bersih yang mendukung kesehatan masyarakat juga berkorelasi dengan perkembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mengatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk lebih cepat tercapainya kualitas udara yang baik di kawasan DKI Jakarta dengan cara mengkombinasikan regulasi dengan kesadaran pada masyarakat dan pemangku kebijakan dalam membentuk suatu regulasi atau kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran udara yang ada di kawasan DKI Jakarta. Sementara itu pemerintah DKI Jakarta juga melakukan kerjasama dalam pengelolaan limbah sampah dengan BUMD DKI Jakarta untuk menggarap proyek tersebut ITF itu sendiri merupakan kapanjangan dari *Intermediate Treatment Facilities* pembangunan ini ditujukan untuk membantu bantar gebang dalam penampungan dan pengelolaan sampah di kawasan DKI Jakarta dalam kerjasama tersebut pemerintah DKI menggendeng beberapa investor dan

kontraktor asing dalam pembangunan dan pengelolaan proyek tersebut guna memaksimalkan segala kebutuhan tempat penampungan yang ada.

1.7. Definisi operasional

1.7.1. Norma Internasional

Norma internasional memiliki banyak peran dalam perkembangan dunia Ilmu Hubungan internasional dalam hal ini peneliti menggunakan Norma Internasional sebagai alat ukur dan bagaimana pemerintah DKI Jakarta dalam merumuskan segala kebijakan yang sudah terjalin serta faktor faktor apa saja yang menjadi pendukung interpretasi Pemerintah DKI Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di kawasan DKI Jakarta. Dalam teori ini juga kita dapat melihat bagaimana peran Pemerintah DKI Jakarta dalam dunia internasional serta sejauh mana pemerintah DKI Jakarta memainkan peran dalam mematuhi rezim terkait isu lingkungan yang ada.

1.7.2. *Green Politic*

Konsep *Green Politic* merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana seharusnya suatu lingkungan terbangun dan bagaimana antar individu saling berdampingan dan melakukan pembangunan yang didasari atas keberlangsungan makhluk hidup lainnya serta didasarkan atas pemeliharaan lingkungan. Pada konsep ini juga menggabungkan dua teori yaitu teori politik dan teori lingkungan teori ini digunakan untuk penguat dalam kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan aspek aspek lingkungan.

1.7.3. Kerjasama dalam pembangunan *Green City* Dki Jakarta

Konsep ini menjelaskan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan *Green City* dan bagaimana arah dari kebijakan pemerintah DKI Jakarta dlama melakukan pembangunan *Green City*, kerjasama itu sendiri dilakukan untuk mempercepat serta membantu pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan *Green City* hal ini di dasari karna semakin parahnya pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan DKI Jakarta.

1.8. Argumen Penelitian

Dari latar belakang, rumusan masalah, dan kajian teori yang digunakan argumen utama penelitian ini adalah : Internalisasi norma *Green Politic* oleh Pemerintah DKI Jakarta merupakan proses bertahap yang bertujua mengimplementasikan norma lingkungan internasional ke dalam kebijakan pembangunan *Green City* di Jakarta, di mana internalisasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mentransformasikan norma global menjadi kebijakan politik lokal yang efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tingkat kota.

1.9. Metode penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk analisa dan mengkaji penelitian iniCre. (Creswell 2008) mengungkapkan metode kualittif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk menegeksplorasi atau mengetahui suatu

gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut maka peneliti tersebut mengejaukan beberapa pertanyaan yang umum dan luas kepada partisipan atau narasumber. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis hendak melakukan analisis secara mendalam menggunakan informasi yang didapatkan dengan dasar konsep yang digunakan.

1.9.1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang subjek atau objek yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta, karakteristik subjek, dan frekuensi yang diteliti. (Nugrahani, 2014:96).

1.9.2. Situs Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Khususnya daerah yang dilibatkan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan yang ada di DKI Jakarta.

1.9.3. Subjek Penelitian

eneliti akan meniliti terkait bagaimana perumusan dan pengintepretasian kebijakan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang ada di DKI Jakarta

serta langkah- langkah apa saja yang telah di lakukan pemerintah DKI Jakarta dalam penanggulangan permasalahan tersebut.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kualitatif yakni melalui teks dan kata-kata tertulis dalam memberikan penjelasan dan menjawab terhadap fenomena yang diteliti oleh penulis. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber data seperti narasumber, peristiwa atau aktivitas, dan dokumen-dokumen yang tersedia. (Nugrahani, 2014:212).

1.9.5. Sumber Data

Dalam memperoleh sumber data nara sumber menggunakan data sekunder yang hendak digunakan dalam penelitian ini yaitu internet/ *Online Research* serta memanfaatkan media social instagram. Penulis hendak menggunakan beberapa macam jenis dokumen seperti Koran, majalah, jurnal, buku, artikel dan lain sebagainya. (Nugrahani, 2014:13).

1.9.6. Teknik analisis data

Metode yang dipakai penulis dalam analisis data di penelitian ini adalah analisis kualitatif kongruen. Menurut George&Bennett (Rosyidin, 2019:61), metode kongruen mencakup pencocokan antara teori dan data. Penulis berdasarkan teori yang diterapkan kemudian menguji teori itu untuk mengungkap atau memprediksi dalam situasi tertentu. Teori ini mengemukakan hubungan antara varian dalam variabel dependen

dan independen kemudian digunakan sebagai penyaring information. Dengan kata lain, metode ini menganalisis pada logika sebab-akibat yang berlandaskan dari teori penulis dengan mengkaitkan konsep yang ada yang akan menjadi alat untuk menyaring/ filter data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian disajikan dalam bentuk pembahasan. Data yang disajikan penulis adalah data yang berkesusaian dengan teori dan argumen penulis.